

PERAN *DIGITAL COPING* DALAM PENGUATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS *E-GOVERNMENT*

*The Role of Digital Coping in Strengthening Government Accounting Information Systems
Based on E-Government*

Nurul Izmi Muhajir¹⁾, Wahyuni²⁾, Indriana³⁾

Email: nurulizmimuhajir@gmail.com¹, wahyuni@unismuh.ac.id², indriana@unismuh.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Urip Sumoharjo No.km.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90231

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital coping dalam memperkuat Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis e-government. Transformasi digital di sektor publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga kemampuan aparatur dalam mengelola tekanan digital (technostress) melalui strategi coping yang adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada beberapa instansi pemerintah di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan SIAP. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital coping berpengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan SIAP dengan nilai koefisien sebesar 0,785, t-statistics 11,126, dan p-value 0,000. Nilai R-square sebesar 0,616 menunjukkan bahwa digital coping mampu menjelaskan 61,6% variasi penguatan sistem. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi coping yang efektif, baik problem-focused maupun emotion-focused coping, mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi keuangan pemerintah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital dan dukungan organisasi dalam menghadapi transformasi digital. Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-government tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan adaptif aparatur sebagai pengguna utama sistem.

Kata kunci : Digital Coping, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, E-Government, Akuntabilitas

Abstract

This study aims to examine the role of digital coping in strengthening the e-government-based Government Accounting Information System (GAIS). Digital transformation in the public sector is not solely determined by technological readiness but also by the ability of government officials to manage technostress through adaptive coping strategies. This research employs a quantitative approach with an explanatory research design. Data were collected through questionnaires distributed to civil servants in several government agencies in Makassar City and South Sulawesi Province who utilize GAIS. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (SEM-PLS). The results reveal that digital coping has a positive and significant effect on strengthening GAIS, with a path coefficient of 0.785, t-statistics of 11.126, and a p-value of 0.000. The R-square value of 0.616 indicates that digital coping explains 61.6% of the variance in system strengthening. These findings suggest that effective coping strategies, including problem-focused and emotion-focused coping, enhance data accuracy, processing speed, transparency, and accountability in government financial management. The study highlights the importance of strengthening human resource capacity through digital literacy training and organizational support in coping with digital transformation. Therefore, the success of e-government implementation depends not only on technological infrastructure but also on the adaptive capabilities of system users.

Keywords: Digital Coping, Government Accounting Information System, E-Government, Accountability

PENDAHULUAN

Era digital adalah suatu era atau zaman yang di dalamnya sudah memiliki kondisi perkembangan begitu maju sehingga semua aktivitas bisa dilakukan secara digital. Perkembangan era digital yang semakin pesat telah mempengaruhi berbagai aspek dan bidang kehidupan salah satunya dibidang akuntansi di lembaga pemerintah, (Kinanti et al., 2025). Era digital ini ditopang oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menurut (Bilan et al., 2023), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan penting dalam mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan akses ke sumber daya pengetahuan, serta mendukung kolaborasi dan inovasi di berbagai bidang. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar, yang pada gilirannya membantu pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan efisien.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat seiring dengan era globalisasi saat ini memberikan dampak yang sangat besar. Salah satu dampak positifnya adalah munculnya konsep *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. *E-Government* memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki aksesibilitas, (Sulastri et al., 2025).

Transformasi digital yang diwujudkan melalui penerapan *electronic government (e-government)* dipandang sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. *E-Government* memungkinkan integrasi proses administrasi, pengelolaan data publik, hingga sistem keuangan negara dalam satu ekosistem digital yang dapat diakses secara lebih terbuka dan efisien, (Assegaf, 2022). Pemerintah Indonesia pun menjadikan *e-government* sebagai prioritas strategis dalam rangka memperkuat transparansi publik dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pengendalian birokrasi.

Meski demikian, implementasi *e-government* meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di masyarakat, serta kurangnya integrasi sistem antar instansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi pengembangan *e-government* mencakup peningkatan infrastruktur, standarisasi sistem, serta pelatihan sumber daya manusia, (Guntur et al., 2025). Selain itu, persoalan keamanan data dan ancaman siber juga menjadi perhatian serius, karena kegagalan menjaga kerahasiaan dan integritas data publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (Judijanto & Amin, 2025).

Di Indonesia *e-government* mulai berkembang, dimana pemerintah mulai menyadari perlunya pengembangan *e-government* di seluruh jajaran pemerintahan, maka pada tahun 2003 dikeluarkanlah Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai pengembangan *e-government* di Indonesia. *E-Government* merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Saat ini, praktik *e-Government* di Indonesia dikelola oleh Direktorat *E-Government*, satuan kerja yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015. Secara yuridis, terdapat setidaknya enam produk hukum di Indonesia yang menggaris bawahi pentingnya inisiatif keterbukaan pemerintah serta partisipasi publik, yang dapat diwujudkan melalui *e-government*. Beberapa regulasi tersebut, di antaranya Pasal 28F UUD 1945, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, (Andayani et al., 2024).

Dalam lingkup akuntansi pemerintahan, digitalisasi membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang terintegrasi dalam kerangka *e-government* dapat mengurangi kesalahan manual, memperkuat pengawasan anggaran, dan memberikan laporan keuangan secara *real-time*. Hal ini selaras dengan prinsip *good governance* yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, (Kusumawati, 2024). Namun, manfaat ini tidak dapat dicapai secara otomatis tanpa kesiapan mental, budaya organisasi, dan keterampilan digital para pejabat yang mengelola sistem.

Di sinilah konsep *digital coping* menjadi krusial. *Digital coping* merujuk pada strategi adaptasi yang dilakukan individu maupun organisasi untuk mengatasi stres, tekanan, atau tantangan akibat perubahan digital. Dalam konteks birokrasi, aparatur sering menghadapi beban psikologis berupa kecemasan terhadap kegagalan menggunakan teknologi baru, resistensi terhadap perubahan prosedur kerja, hingga tekanan kinerja yang meningkat karena sistem berbasis digital menuntut kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi, (Afzal & Panagiotopoulos, 2024).

Penguatan sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis *e-government* memerlukan dukungan teknologi yang andal serta strategi digital yang efektif. Tanpa hal tersebut, terdapat potensi risiko sistem tidak berjalan optimal, sehingga pejabat pemerintah bisa saja menolak perubahan dan muncul kendala dalam pengelolaannya. Sebaliknya, apabila pemerintah mampu merancang strategi digital yang tepat, maka hal itu dapat meningkatkan kinerja sistem sekaligus mempermudah aparaturnya dalam beradaptasi. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel, transparan, serta dipercaya dalam mengelola keuangan publik, (Maulidi et al., 2025).

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) memiliki berbagai keunggulan, antara lain meningkatkan akurasi dan kualitas laporan keuangan, mempercepat proses pengolahan data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, (Putra & Amalia, 2021). Selain itu, sistem ini juga mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah serta memudahkan pengawasan internal, (Saripuspita et al., 2024). Namun demikian, penerapan SIAP juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya implementasi dan pemeliharaan, resistensi pegawai terhadap perubahan, keterbatasan literasi teknologi, serta risiko keamanan data dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, (Pratiwi et al., 2022). Adapun berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan tentang penerapan SIAP sering kali mengalami tantangan seperti gangguan jaringan dan kurangnya pemahaman para pengguna dalam mengakses. Dengan demikian, meskipun SIAP berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan strategi adaptasi digital yang tepat.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian mendalam terhadap peran digital coping dalam sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis *e-government*. *Digital coping* dapat membantu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem informasi akuntansi pemerintah, meningkatkan kinerja sistem, dan mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap hubungan antara *digital coping* dan penguatan sistem informasi akuntansi pemerintah, serta mengembangkan rekomendasi terkait kebijakan, program pelatihan, dan perancangan sistem *e-government* yang lebih mendukung akuntansi pemerintah yang efektif, (Syairozi et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afzal dan Panos Panagiotopoulos (2024) terkait *Coping with digital transformation in frontline public services: A study of user adaptation in policing*. Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat dipengaruhi kemampuan pejabat publik beradaptasi melalui *digital coping*. Persepsi sistem sebagai peluang atau ancaman, tingkat kontrol, dan ruang diskresi menentukan strategi adaptasi yang muncul. Petugas yang memandang sistem sebagai peluang dan merasa berdaya cenderung menggunakan strategi pro-adopsi yang meningkatkan kinerja, sedangkan mereka yang merasa terancam dan kurang kontrol lebih sering memakai strategi pelestarian diri yang berdampak negatif. Karena itu, keberhasilan *e-government* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada dukungan organisasi, ketersediaan sumber daya, dan ruang diskresi agar adaptasi berlangsung positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sánchez, Plaza, dan Silva (2024) terkait *Digital adaptation strategies and user engagement in public financial information systems*. Menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi keuangan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparaturnya dalam melakukan strategi adaptasi digital. Studi tersebut menemukan bahwa *user engagement* meningkat ketika pengguna mampu belajar teknologi baru, mengelola stres digital, dan memanfaatkan fitur sistem secara optimal. Adaptasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mekanisme *coping* dalam menghadapi perubahan, seperti mencari solusi dan meningkatkan keterampilan digital. Aparatur yang mampu beradaptasi dengan baik terbukti memiliki kinerja lebih efektif dan mendukung optimalisasi sistem informasi keuangan pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem informasi publik ditentukan bukan hanya oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan kemampuan coping para penggunanya.

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan menekankan peran *digital coping* dalam memperkuat sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis *e-government*. Dengan perhatian khusus pada pengelolaan keuangan dan pelaporan akuntansi, penelitian ini menyoroti pentingnya kesiapan pegawai pemerintah, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi secara optimal agar sistem informasi akuntansi dapat berfungsi secara efektif.

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-government* di berbagai instansi menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat lunak dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam beradaptasi terhadap perubahan dan tekanan teknologi. Dalam praktiknya, masih dijumpai kendala seperti *technostress*, kesulitan penggunaan aplikasi, serta hambatan teknis yang dapat memengaruhi akurasi dan ketepatan pelaporan keuangan. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan *digital coping*, baik melalui strategi pemecahan masalah maupun pengelolaan emosi, agar aparatur mampu tetap produktif, responsif, dan solutif dalam menjalankan sistem. Kemampuan adaptif tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penggunaan sistem, meningkatkan kualitas informasi keuangan, serta mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, (Syairozi et al., 2021).

Penelitian secara khusus mengambil objek pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan yang terlibat dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-government*. Kota Makassar dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang sedang mengimplementasikan *e-government* dalam pengelolaan administrasi dan akuntansi pemerintahan. Dengan kompleksitas birokrasi, tingginya kebutuhan layanan publik, serta tantangan adaptasi teknologi yang dihadapi, Makassar menjadi konteks yang relevan untuk melihat bagaimana strategi *digital coping* dapat membantu aparatur pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, ketepatan data, dan akuntabilitas sistem informasi akuntansi pemerintah. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Peran *Digital Coping* dalam Penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Berbasis *E-Government*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan hubungan kausal antara variabel digital coping dan penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-government*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan empiris mengenai pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis secara statistik (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan pada instansi pemerintah di Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-government* dalam pelaksanaan tugasnya. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria ASN yang terlibat langsung dan aktif dalam penggunaan sistem tersebut. Sampel penelitian mencakup lima instansi, yaitu Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai data primer, serta studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan resmi, dan literatur relevan sebagai data sekunder. Jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 70 eksemplar kepada responden yang memenuhi kriteria. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 kuesioner kembali, namun terdapat 5 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria pengisian. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang layak diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 kuesioner, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis data. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari digital coping sebagai variabel independen (X) dan penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) sebagai variabel dependen (Y). Variabel digital coping diukur melalui dua indikator utama, yaitu *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping* (Lazarus & Folkman, 1984). Sementara itu, variabel penguatan SIAP diukur melalui indikator akurasi data, kecepatan pemrosesan, keandalan sistem, keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi *outer model* meliputi uji validitas

konvergen yang diukur melalui nilai *outer loading* ($>0,70$) dan Average Variance Extracted (AVE $>0,50$), validitas diskriminan menggunakan nilai Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT $<0,90$), serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability ($>0,70$) (Hair et al., 2022). Selanjutnya, evaluasi *inner model* dilakukan melalui pengujian nilai R-square untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta Q-square untuk menilai relevansi prediktif model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui teknik *bootstrapping* dengan melihat nilai *t-statistics* dan *p-value*. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *t-statistics* $> 1,96$ dan *p-value* $< 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel

a. Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin

Adapun klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
Laki-laki	26	43%
Perempuan	34	57%
Total	60	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan lebih mendominasi yaitu 57% atau sebanyak 34 orang. Sedangkan jumlah responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 43% atau 26 orang.

2) Tingkat Pendidikan

Selanjutnya peneliti memperoleh data terkait karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir sebagai berikut:

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
SMA/SMK/MA/Sederajat	14	23%
D3	3	5%
S1	29	48%
S2	14	23%
Total	60	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat jumlah persentase didominasi pada Tingkat Pendidikan S1 yaitu 48% atau sebanyak 29 orang, S2 yaitu 23% atau sebanyak 14 orang, SMA/SMK/MA/Sederajat yaitu 23% atau sebanyak 14 orang, dan D3 yaitu 5% atau sebanyak 3 orang.

3) Jabatan/Pangkat

Dalam hal ini peneliti memperoleh data terkait karakteristik responden berdasarkan jabatan/pangkat sebagai berikut:

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan/Pangkat

Jabatan/Pangkat	Jumlah Orang	Persentase (%)
Staf	46	77%
Jabatan Struktural/Fungsional*	14	23%
Total	60	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan table 3 maka dapat dilihat dari 60 responden yang bekerja di kantor dinas penataan ruang kota makassar, dinas lingkungan hidup kota makassar, dinas pekerjaan umum kota makassar, badan pendapatan daerah kota makassar, dan badan pendapatan daerah provinsi sulawesi-selatan memiliki jabatan/pangkat sebagai staf berjumlah 46 orang atau sekitar 77%, dan responden yang memiliki jabatan struktural/fungsional berjumlah 14 orang atau sekitar 23%.

4) Lama Bekerja

Adapun klasifikasi responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Orang	Persentase (%)
≤ 5 Tahun	22	37%
6 – 10 Tahun	17	28%
11 – 15 Tahun	13	22%
> 15 Tahun	8	13%
Total	60	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 60 responden yang bekerja dilima kantor pemerintahan yang menjadi tempat penelitian memiliki masa kerja ≤ 5 tahun berjumlah 22 orang atau sekitar 37%, pekerja yang memiliki masa kerja 6-10 tahun berjumlah 17 orang atau sekitar 28%, pekerja yang memiliki masa kerja 11-15 tahun berjumlah 13 orang atau sekitar 22%, dan pekerja yang memiliki masa kerja > 15 tahun berjumlah 8 orang atau sekitar 13%.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode analisis statistik inferensial berbasis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS). Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut.

a. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas Konvergen (*Outer Loading* dan *Average Variance Extracted / AVE*)

Uji validitas konvergen bertujuan untuk mengukur indikator dalam suatu variabel mampu menjelaskan variable laten yang dimaksud. Indikator dianggap valid apabila nilai *outer loading* > 0,7 yang berarti menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang tinggi dengan konstruksinya. Namun, adapun menurut (Hair et al., 2022), nilai antar 0,6-0,7 masih dapat diterima. Output Smart PLS untuk *outer loading* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Nilai *Outer Loading*

Variabel	DC	PSIAP
DC1	0,884	
DC2	0,798	
DC3	0,874	
DC4	0,714	
DC5	0,862	
DC6	0,772	

Variabel	DC	PSIAP
DC7	0,804	
DC8	0,713	
PSIAP1		0,832
PSIAP10		0,789
PSIAP11		0,891
PSIAP2		0,645
PSIAP3		0,881
PSIAP4		0,813
PSIAP5		0,814
PSIAP6		0,809
PSIAP7		0,873
PSIAP8		0,779
PSIAP9		0,849

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5, seluruh indikator pada variabel *Digital Coping* (DC) menunjukkan *outer loading* di atas 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator DC mampu merefleksikan konstruk *Digital Coping* secara baik dan memenuhi kriteria validitas konvergen.

Pada variabel Penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (PSIAP), Sebagian besar indikator juga memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7 yang menunjukkan konstruksi indikator yang kuat terhadap konstruk PSIAP. Terdapat satu indikator, yaitu PSIAP2, yang memiliki nilai *outer loading* sebesar 0,645 berada di bawah nilai ideal 0,7. Namun demikian, nilai tersebut masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Menurut Hair et al. (2022), indikator dengan nilai *outer loading* di atas 0,6 masih dapat dipertahankan selama nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan realibilitas konstruk tetap memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel *Digital Coping* (DC) dan PSIAP telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga instrument penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan.

Validitas konvergen juga dinilai melalui *Average Variance Extracted* / AVE. Uji ini tercapai jika nilai AVE > 0,5, yang berarti lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh variabel laten.

Tabel 6
Average variance extracted (AVE)

Variabel	<i>Average variance extracted (AVE)</i>	Keterangan
DC	0,648	Valid
PSIAP	0,670	Valid

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Pada tabel 6 di atas dilihat bahwa nilai AVE dari setiap konstruk dalam model menunjukkan > 0,5 maka penelitian ini mengindikasikan bahwa ini valid dan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

2) Uji Validitas Diskriminan (*Heterotrait–Monotrait Ratio*/ HTMT)

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan perbedaan antar konstruk dalam model penelitian. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Heterotrait–Monotrait Ratio*/HTMT, suatu indikator dinyatakan memenuhi apabila nilai HTMT < 0,9. Adapun hasil HTMT dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 7
Nilai *Heterotrait–Monotrait Ratio*/HTMT

Variabel	DC	PSIAP
DC		
PSIAP	0,825	

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Tabel 7 diatas menunjukkan nilai *Heterotrait–Monotrait Ratio*/HTMT menunjukkan nilai antara DC dan PSIAP sama, yaitu sebesar 0,825. nilai berada dibatas ketentuan $< 0,9$, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan antar konstruk telah terpenuhi. Dengan demikian, masing-masing konstruk dalam model mampu mengukur konsep yang berbeda secara empiris.

3) Uji Reliabilitas (*Cronbach's Alpha*)

Uji realibilitas ini bertujuan untuk mengukur konsistensi internal dari item pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner yang reliabel tercapai jika menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,7$.

Tabel 8
Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reability

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability</i>	Keterangan
DC	0,921	0,936	Reliabel
PSIAP	0,950	0,957	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Dari table 8 diatas dapat dilihat *Composite reliability* dan *Cronbach's alpha* dari semua konstruk memiliki nilai $> 0,7$. Artinya semua variabel pada model penelitian memiliki internal consistency reability.

3. Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah mengevaluasi *outer model* Langkah selanjutnya evaluasi *inner model*, diantaranya:

- a. Nilai *R-square* merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya kemampuan variabel independent yang menjelaskan variabel dependen. Nilai pada *R-square* sebesar 0,75 dikategorikan kuat (substantial), 0,5 dikategorikan sedang (moderate), dan 0,25 dikategorikan lemah (weak). Dibawah ini merupakan hasil uji *R-square*.

Tabel 1
Nilai *R Square*

Variabel	R-square	R-square adjusted
PSIAP	0,616	0,609

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel 9 hasil nilai *R-square* untuk variabel Y yaitu penguatan sistem informasi akuntansi pemerintah (PSIAP) sebesar 0,616 yang berarti bahwa sebesar 61,6% variasi PSIAP dapat dijelaskan oleh variabel independent dalam model penelitian, sedangkan sisanya 38,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

- b. Nilai *Q-square* digunakan untuk menilai relevansi prediktif dari model struktural. Suatu model dikatakan memiliki relevansi prediktif yang baik apabila nilai *Q-square* lebih besar dari nol ($Q^2 > 0$). Sebaliknya, apabila nilai *Q-square* kurang dari atau sama dengan nol, maka model dinyatakan tidak memiliki kemampuan prediktif terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai *Q-square*, maka semakin baik kemampuan prediktif model penelitian tersebut. Dibawah ini merupakan hasil uji *Q-square*.

Tabel 10
Nilai *Q Square*

Variabel	Q^2 predict
PSIAP	0,557

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan table 10 hasil nilai *Q-square* sebesar 0,557, yang berarti bahwa nilai $Q^2_{predict}$ variabel PSIAP sebesar 0,557, yang berarti bahwa model penelitian memiliki relevansi prediktif yang besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model struktural memiliki kemampuan prediksi yang baik.

4. Uji Signifikansi Jalur (*Path Coefficient*)

Uji signifikansi jalur ini menggunakan *bootstrapping* untuk melihat nilai t-statistik dan p-value.

a. t-statistics

t-statistics bertujuan untuk menunjukkan seberapa kuat bukti terhadap hubungan antar variabel. Jika t-statistics > 1,96 → hubungan signifikan ($\alpha = 0,05$), dan t-statistics > 2,58 → sangat signifikan ($\alpha = 0,01$).

b. p-value

p-value bertujuan untuk mengukur probabilitas kesalahan dalam menolak hipotesis nol (H_0). Jika p-value < 0,05 → signifikan. Dan jika p-value $\geq 0,05$ → tidak signifikan.

Tabel 11
Nilai T statistics dan P value

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P value
DC -> PSIAP	0,785	0,791	0,071	11,126	0,000

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Hubungan DC (X) dengan PSIAP (Y) berdasarkan tabel 11 menunjukkan koefisien 0,785 yang positif dan secara statistik dinyatakan sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistics sebesar 11,126 yang jauh lebih > 2,58 yang merupakan kriteria t-statistics > 2,58 → sangat signifikan ($\alpha = 0,01$), dan p-value sebesar 0,000 yang jauh lebih < 0,05 → signifikan.

5. Uji Hipotesis

a. Hipotesis diterima apabila nilai t-statistics > 1,96 dan p-value < 0,05.

b. Hipotesis ditolak apabila nilai t-statistics $\leq 1,96$ dan p-value $\geq 0,05$.

Tabel 2
Uji Hipotesis

Variabel	T statistics	P Value
DC -> PSIAP	11,126	0,000

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan table 12 hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS, pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh *digital coping* terhadap penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-Government*, sebagaimana dinyatakan dalam H1. Hasilnya menunjukkan bahwa *Digital coping* berpengaruh positif terhadap penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-Government* dengan nilai t-statistics sebesar 11,126 yang jauh lebih > 2,58 yang merupakan kriteria untuk t-statistics > 2,58 → sangat signifikan ($\alpha = 0,01$), dan P-value sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa H1 diterima.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) memiliki kaitan erat dengan kerangka regulasi yang berlaku. Hal ini didukung oleh hasil studi dokumentasi terhadap Peraturan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023), yang mengamanatkan adanya integrasi sistem aplikasi untuk menjamin keandalan laporan keuangan. Konsistensi jawaban responden dalam kuesioner yang menunjukkan efektivitas sistem sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam PMK tersebut, di mana proses akuntansi yang terdigitalisasi terbukti mampu meminimalisir risiko kesalahan manual dan meningkatkan transparansi pada instansi terkait.

Lebih lanjut, kemampuan *Digital Coping* para aparatur dalam menghadapi transformasi digital didukung kuat oleh adanya landasan hukum operasional di tingkat daerah, yaitu Peraturan (Walikota Makassar, 2021). Penerapan sertifikat dan tanda tangan elektronik yang diatur dalam Perwali ini memaksa sekaligus memfasilitasi pegawai untuk beradaptasi dengan sistem keamanan digital yang lebih tinggi. Studi

dokumentasi ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi *e-government* di lokasi penelitian bukan hanya karena faktor teknis, melainkan juga adanya kepatuhan terhadap regulasi yang menjamin autentikasi dan keamanan data dalam setiap transaksi elektronik.

B. Pembahasan

1. Konsep Digital Coping dalam Konteks Pemerintahan

Berdasarkan hasil analisis data, variabel Digital Coping terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-government*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,785 dengan nilai *t-statistics* sebesar 11,126, yang jauh melampaui ambang batas signifikansi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi coping aparatur pemerintah dalam menghadapi perubahan teknologi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem digital di sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, digital coping tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme adaptasi individu terhadap tekanan teknologi (*technostress*), tetapi juga sebagai kemampuan strategis yang memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini mendukung Teori *Coping Model of User Adaptation* (CMUA) yang dikemukakan oleh Beaudry dan Pinsonneault (2005), yang menjelaskan bahwa respons individu terhadap teknologi baru ditentukan oleh proses penilaian kognitif (*cognitive appraisal*), yang kemudian membentuk strategi adaptasi. Aparatur yang mampu memandang teknologi sebagai peluang cenderung menggunakan strategi *problem-focused coping*, seperti mengikuti pelatihan, mengeksplorasi fitur sistem, dan mencari solusi teknis, sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan sistem. Sebaliknya, individu yang tidak mampu mengelola tekanan teknologi berpotensi menggunakan strategi defensif seperti *self-preservation*, yang dapat menghambat pemanfaatan sistem secara optimal.

Selain itu, aspek *emotion-focused coping* juga berperan penting dalam konteks birokrasi pemerintah. Kemampuan aparatur dalam mengelola emosi, menjaga motivasi, dan membangun sikap positif terhadap perubahan digital terbukti membantu mereka beradaptasi dengan kompleksitas sistem *e-government*. Hal ini menunjukkan bahwa digital coping tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis dalam menghadapi transformasi digital. Temuan ini konsisten dengan penelitian Afzal dan Panagiotopoulos (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam mengelola tekanan, ketidakpastian, dan tuntutan kerja berbasis teknologi.

2. Integrasi Digital Coping dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Dalam konteks Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, digital coping terbukti memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas dan kinerja sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital coping yang efektif mampu meningkatkan akurasi data, kecepatan pemrosesan, serta efisiensi pelaporan keuangan. Aparatur yang memiliki kemampuan coping yang baik cenderung lebih responsif dalam menangani kendala teknis, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan manual dan mendukung pengolahan data secara real-time. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi SIAP tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan pengguna dalam mengoperasikan dan mengelola sistem tersebut.

Integrasi digital coping dalam Sistem Informasi Akuntansi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Aparatur yang mampu beradaptasi dengan sistem digital cenderung lebih teliti, konsisten, dan bertanggung jawab dalam melakukan input serta pengolahan data keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Sánchez et al. (2024) yang menyatakan bahwa kemampuan adaptasi digital berpengaruh terhadap *user engagement* dan kualitas informasi yang dihasilkan dalam sistem keuangan publik. Dengan demikian, digital coping berfungsi sebagai penghubung antara aspek teknis sistem dan pencapaian tujuan akuntansi pemerintahan, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan instansi pemerintah yang lebih menekankan pada penguatan infrastruktur dan perangkat lunak tanpa diimbangi dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan yang berorientasi pada aspek teknis semata sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemanfaatan sistem, kesalahan input data, serta resistensi terhadap perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya integrasi digital coping, sistem informasi akuntansi yang canggih sekalipun tidak akan mampu berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan organisasi menjadi faktor penting dalam mendorong aparatur agar mampu mengelola tekanan digital secara adaptif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa digital coping merupakan faktor kunci dalam optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah berbasis e-government. Keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan adaptif aparatur sebagai pengguna utama. Dengan demikian, integrasi antara kesiapan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem akuntansi pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai peran *digital coping* dalam penguatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) berbasis *e-government*, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pengaruh positif digital coping membuktikan secara empiris bahwa *digital coping* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis *e-government*. Semakin baik kemampuan dan strategi aparatur dalam menghadapi tantangan teknologi (baik melalui *problem-focused coping* maupun *emotion-focused coping*), maka semakin optimal pula fungsi sistem akuntansi dalam menghasilkan data yang akurat, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem informasi akuntansi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat lunak, tetapi sangat bergantung pada kesiapan mental dan kemampuan adaptif sumber daya manusia. Strategi *coping* yang efektif mampu mereduksi tekanan digital (*technostress*), sehingga penggunaan aplikasi akuntansi pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi *digital coping* pada instansi yang diteliti telah menunjukkan hasil nyata dalam memperkuat akuntabilitas anggaran. Kemampuan aparatur untuk tetap tenang dan solutif saat menghadapi gangguan sistem memastikan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan tetap berjalan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintah (Kota Makassar & Pemprov Sulsel)
Perlu adanya program pelatihan literasi digital yang berkelanjutan bagi ASN, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis sistem, tetapi juga pada aspek psikologis untuk membangun strategi *coping* yang positif menghadapi perubahan teknologi. Menyediakan dukungan teknis (*helpdesk*) yang responsif untuk membantu pegawai melakukan *disturbance handling* dengan cepat saat menghadapi kendala pada sistem SIAP.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Diharapkan ASN terus meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan beradaptasi secara proaktif terhadap fitur-fitur baru dalam *e-government* guna meminimalisir kesalahan input data dan mempercepat proses pertanggungjawaban anggaran.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian dengan menambahkan faktor moderasi lain, seperti gaya kepemimpinan digital atau budaya organisasi, untuk melihat variabel apa lagi yang dapat memperkuat pengaruh *digital coping* terhadap kinerja sistem informasi. Disarankan untuk melakukan penelitian pada wilayah lain dengan tingkat literasi digital yang berbeda untuk menguji konsistensi temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, M., & Panagiotopoulos, P. (2024). *Coping with digital transformation in frontline public services : A study of user adaptation in policing*. 41(September).
- Ajrina, A., Hazmi, Y., Farisi, B. Al, & Mauliza, N. (2024). Implementation of an Accounting Information System Improving the Quality of Financial Reporting. *The Es Accounting And Finance*, 2(03), 160–165. <https://doi.org/10.58812/esaf.v2i03.294>
- Amri, N. F. (2024). *Transaksi dan peristiwa yang dicakup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. E-Akuntansi.
- Andayani, W., Brawijaya, U., Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). *Penguatan Good Governance : Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia*. 6(2), 116–131.
- Arslan, O. (2021). *Modern Approaches, Recording Methods, and International Regulations on Public Accounting*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000105011>
- Assegaf, N. A. (2022). *Digital Transformation Of The Public Administration Sector For Improving Public Services Through An E-Government Approach*. 4(1), 695–703.
- Bank, T. W. (2016). *Digital Dividens*.
- Beaudry, A., & Pinsonneault, A. (2005). *Understanding user responses to information technology: A coping model of user adaptation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/25148693>
- Bilan, Y., Oliinyk, O., Mishchuk, H., & Škare, M. (2023). *Impact of information and communications technology on the development and use of knowledge*. 191. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122519>
- BPK. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Brooks, S. (2023). Managing digital transformation stress in public sector organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Gimpel, H., Lanzl, J., Regal, C., Urbach, N., Becker, J., & Tegtmeier, P. (2025). Stress from Digital Work: Toward a Unified View of Digital Hindrance Stressors. *Information Systems Research*, 36(2), 896–915. <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/isre.2022.0691>
- Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 128–136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516>
- Guntur, W. N., Tuan, Y., & Asnawi, N. (2025). *Implementasi E-Government Bagi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Kabupaten Manggarai*. 2, 177–188.
- Hair, j. f., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- Hakansta, C., Asp, A., & Palm, K. (2025). Effects of work-related digital technology on occupational health in the public sector: A scoping review. *Work*, 81(2), 2477–2490. <https://doi.org/10.1177/10519815251320274>
- Idrawahyuni, S. P. *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep, Pengendalian, dan Aplikasi dalam Siklus Bisnis*.
- Indrayani. (2022). *Modul: Sistem Informasi Akuntansi*. IAIN Parepare.
- Judijanto, L., & Amin, A. (2025). *Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Implikasi dan Tantangan Hukum Administrasi Negara*. 3(2), 1–7.
- Kerlinger, F. N. (1973). *Foundations of behavioral research (2nd ed.)*. Holt, Rinehart and Winston.

- Kinanti, A. S., Aso, M. A., Ariyadi, S. M., & Aisyah, S. (2025). *Dampak Teknologi Informasi Terhadap Akuntansi Pemerintahan di Era Digital perkembangan penerapan akuntansi digital di pemerintahan , khususnya terkait peningkatan*. 3(1), 169–174.
- Kris, D. (2023). Accounting Information System (AIS): Transforming Financial Data into Strategic Insight. *Int J Account Res*, 11(1000344), 1000344–1000345. <https://doi.org/10.35248/2472-114X.23.11.347.Citation>
- Kusumawati, N. (2024). *Dampak Digitalisasi Bagi Efektivitas Implementasi Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. 1 No 1, 11–21.
- Lazarus, S. R., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.
- Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2021). Digital government transformation and user adaptation: A socio-technical perspective. *Government Information Quarterly*.
- Lutfi, A. (2023). Factors affecting the success of accounting information system from the lens of DeLone and McLean IS model. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(2), 100202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijime.2023.100202>
- Maier, C., Laumer, S., Eckhardt, A., & Weitzel, T. (2019). Technostress and the hierarchical levels of coping behavior. *Maier, C., Laumer, S., Eckhardt, A., & Weitzel, T.*
- Maulidi, M. R., Saafira, Z., Nabila, J., & Mariana, M. (2025). Digital Transformation In Local Government: Enhancing Financial Transparency Through The Regional Financial Information System (SIKD) pelaporan keuangan . Transparansi dipandang sebagai elemen kunci dalam. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 54–66.
- Mayasari, R. (2024). Synergy of Systems, Strategy, and Culture : Examining the Determinants of Financial Report Quality in the Public Sector. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(3), 537–551. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ijemr.v3i3.522>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Monteiro, A. P., Vale, J., Leite, E., & Lis, M. (2024). Linking quality of accounting information system and financial reporting to non-financial performance: The role women managers. *International Journal of Accounting Information Systems*, 54(June), 100692. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accinf.2024.100692>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Nations, U. (2020). *E-Government*.
- Pratiwi, A., Vonna, S. M., & Harmi, M. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Nagan Raya. *Jurnal Sains Riset*, 12(2), 456.
- Putra, D., & Amalia, R. (2021). Penggunaan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis. *Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, 5(3), 198–206.
- Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. 1, 147–173.
- Risakotta, K. A., Harmadji, D. E., Putra, D. G., Winarni, D., Sopanah, A., Murni, Y., Adelina, C., Payamta, & Rachmani, F. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik. In *Eureka Media Aksara*.
- Riswati, R. (2021). Implementasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi teknologi

- Sampetoding, E. A. M., Uksi, R., & Pongtambing, Y. S. (2024). Digital Transformation pada Sistem Informasi Akuntansi di Desa. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 2(1), 72–77. <https://doi.org/10.36733/jia.v2i1.9046>
- Santoso Puji Ahmad, I. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–10.
- Saripuspita, S. C., Sari, C. T., & Budiyono, R. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas di Kabupaten Demak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 16(1), 119–128. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v16i1.658>
- Sekedang, Y. Y., & Napitupulu, I. H. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Implementasi E-Government di Politeknik Negeri Medan. *KIRANA : Social Science Journal*, 2(2), 39–47. <https://doi.org/10.61579/kirana.v2i2.375>
- Sonjaya, Y., Prasetyaningrum, S., Auliyah, I., & Labo, I. A. (2025). Implementation of Public Sector Accounting Systems and Standards in Improving Financial Transparency. *Advances in Applied Accounting Research*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.60079/aaar.v3i1.420>
- Sriwijayanti, H. (2021). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 89–101. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v7i1.6>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sulastri, I., Mahsuni, W. ., & Anwar, A. . (2025). *Pengaruh E-Government Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di Pemerintahan Daerah (Studi Kecamatan WAWO NTB Bima)*. 14(01), 1007–1018.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. ... *Dan Pengabdian 2021*, 4, 49–59.
- Tarafdar, M., Maier, C., Laumer, S., & Weiner, M. (2020). Technostress: A review and conceptual development of a nascent research area. *Information Systems Journal*.
- Wahyuni, Razak, L. A., & Anriani, N. (2024). Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Takalar Regency Regional Financial and Revenue Management Agency. *IECON: International Economics and Business Conference*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.65246/rwgrb023>
- Walikota Makassar. (2021). *Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. JDIIH Kota Makassar.
- Wrede, S. J. S., Rodil dos Anjos, D., Ketschau, J. P., Broding, H. C., & Claassen, K. (2021). Risk factors for digital stress in German public administrations. *BMC Public Health*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-021-12247-w>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>